

Objektifikasi Penafsiran Al-Qur'an sebagai Upaya dalam Memperkuat Wawasan Kebangsaan

Beta Pujangga Mukti, UMY, betapujangga83@gmail.com

Abstract

The Holy Quran, the first *maṣḍar tasyrī'*, teaches the importance of developing unity. However, the phenomenon that has occurred recently shows the opposite fact. Some groups want to develop Indonesia only with the spirit of nationality, but other groups want to base it only on religion. Indonesia's development cannot be based solely on the spirit of nationality or religion alone. This paper examines the above problems with the descriptive-analytical method. The researcher presents facts about the pattern of the relationship between religion and nationalism or Islam and nationality (*das sein*). Then, the researcher offers a pattern of relationships that each element of the nation should strive for (*das sollen*). This study concludes that the pattern of the relationship between religion and nationalism or Islam and nationality needs to be brought from an attitude of subjectivity to an attitude of objectivity. If the aspect of subjectivity appears — in the sense of just believing in the individual truth and accusing others of being wrong, it can lead to SARA (social problems between ethnicity, religion, race and community). Therefore, both religion and nationalism or Islam and nationality need to bring up objective values as a common denominator, namely a common reference in developing Indonesia.

Al-Quran, *maṣḍar tasyrī'* pertama, mengajarkan pentingnya membangun persatuan. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini justru menunjukkan fakta sebaliknya. Sebagian kelompok ingin membangun Indonesia hanya dengan spirit kebangsaan, namun di kelompok lain ingin mendasarkan hanya pada agama. Pembangunan Indonesia tidak dapat didasarkan hanya pada spirit kebangsaan atau agama semata. Makalah ini mengkaji problematika di atas dengan metode deskriptif-analisis. Peneliti menyajikan fakta tentang pola hubungan agama dan nasionalisme atau Islam dan kebangsaan (*das sein*). Kemudian, peneliti menawarkan pola hubungan yang seharusnya diusahakan oleh setiap elemen bangsa (*das sollen*). Kajian ini menyimpulkan bahwa pola hubungan agama dan nasionalisme atau Islam dan kebangsaan perlu dibawa dari sikap subjektivitas kepada sikap objektivitas. Jika aspek subjektivitasnya yang muncul — dalam arti meyakini kebenaran masing-masing dan menuduh yang lain salah, maka bisa menimbulkan SARA. Oleh karena itu, baik agama dan nasionalisme atau Islam dan kebangsaan perlu memunculkan nilai objektif sebagai *common denominator*, yaitu rujukan bersama dalam membangun Indonesia.

Keywords: *Objectification of Al-Qur'an Interpretation, Religion and Nationalism, Islam and Nationality*

Pendahuluan

Antara Islam dan kebangsaan sesungguhnya tidak ada pertentangan, keduanya seperti dua sisi dari mata uang yang sama dan keduanya tentu tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi. Menurut Kuntowijoyo,¹ dalam Islam ada ajaran tentang pasangan atau *zaujain*, misalnya pasangan antara suami dan istri. Dalam ilmu logika ada istilah “*unity of the opposites*” yaitu kesatuan dari sesuatu yang bertentangan. Dalam bahasa Jawa, juga dikenal istilah “*loro-loroning atunggal*”, dua wujudnya tetapi satu hakikatnya. Begitu juga dengan Agama dan kebangsaan merupakan dua entitas yang bisa dipasangkan, karena kedua-duanya dapat menjadi satu kesatuan.

Tanpa Agama, suatu bangsa akan hancur. Sebaliknya, dengan Agama, suatu bangsa akan memiliki peradaban dan kemajuan. Filosof Saint Augustin² dalam bukunya “*Philosophy of Religion*” mengatakan, “Mengapa aku beragama? Sesungguhnya aku belum pernah sekalipun menggerakkan bibirku dengan pertanyaan ini kecuali aku melihat diriku tergiring untuk menjawabnya dengan jawaban ini, yaitu aku beragama karena aku tidak dapat menentang hal itu, karena hidup beragama adalah sesuatu yang lazim secara moril termasuk diantara kelaziman pribadi”. Senada dengan pernyataan tersebut, sejarawan Yunani, Grecian Blue Tark mengatakan, “Aku telah menemukan dalam sejarah, sebuah kota tanpa benteng, sebuah kota tanpa istana dan tanpa sekolahan, tetapi saya belum pernah menemukan kota tanpa tempat ibadah”.

Imam Hasan Al-Banna³ dalam risalahnya berjudul “*Wathaniyah*” menegaskan bahwa tidak perlu mempertentangkan antara Islam dengan sikap nasionalisme atau kebangsaan begitu juga sebaliknya. Islam tidak mengharamkan sikap nasionalisme, pun juga tidak melarang orang memiliki wawasan kebangsaan seperti misalnya cinta tanah air, berjuang demi Negara bahkan rela mati demi mempertahankan kedaulatan Negara dari penjajah atau serangan yang mengancam. Justru Islam sangat menekankan cinta tanah air bahkan oleh sebagian ulama memberikan fatwa bahwa “*Hubbul wathan minal-iman*” cinta tanah air adalah sebagian dari iman.

¹ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid; Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2018).

² Saint Augustin dan Grecian Blue Tark, “*Philosophy of Religion*,” in *Pengantar Kajian Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

³ Hasan Al-Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna*, ed. Khozin Abu Faqih (Jakarta: Al-I'tishom, 2007).

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini justru menunjukkan fakta sebaliknya. Sebagian kelompok ingin membangun Indonesia dengan spirit kebangsaan, namun di kelompok lain ingin berdasarkan agama. Bahkan kedua kutub pemikiran ini saling melontarkan tuduhan. Yang satu dituduh sebagai nasionalis sekuler dan satunya menuduh bahwa agama sebagai sumber munculnya gerakan radikalisme dan agama juga dianggap sebagai sektarian dan primordial alias anti kebangsaan. Dua kutub ini terus berseberangan seolah tidak ada jalan tengah untuk duduk bersama, berdialog supaya tidak semakin memecah belah persatuan bangsa dan menghindari polarisasi yang tidak berkesudahan. Dua-duanya mempunyai maksud yang baik, tetapi niat baik dengan mempertahankan dan mengunggulkan ego tujuan masing-masing tentu akan berujung tidak baik.

Apabila berbicara tentang membangun Indonesia, namun sikap dan cara kerjanya masih mendasarkan hanya kepada spirit kebangsaan atau hanya berdasarkan agama semata-mata, tentu sudah tidak lagi relevan. Dengan semangat zaman yang semakin maju ke depan, maka dalam menyikapi agama dan nasionalisme atau Islam dan kebangsaan perlu dibawa dari sikap subjektivitas kepada sikap objektivitas. Dalam pandangan Kuntowijoyo,⁴ baik Islam maupun kebangsaan ada aspek subjektifnya, ada juga aspek objektifnya. Pertentangan antara Islam dan kebangsaan, sebenarnya juga berlaku untuk agama lain. Dapat dipertentangkan antara agama Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha, di satu pihak, dengan kebangsaan, di pihak lain. Jika aspek subjektivitasnya yang keluar, dalam arti meyakini kebenaran masing-masing dan menuduh yang lain salah, maka bisa menimbulkan SARA. Oleh karena itu, baik agama dan nasionalisme atau Islam dan kebangsaan perlu memunculkan nilai objektif sebagai *common denominator*, yaitu rujukan bersama dalam membangun Indonesia.

Tawaran Pola Hubungan Agama dan Nasionalisme atau Islam dan Kebangsaan

Menurut Prof. Muladi,⁵ Gubernur (Lemhannas RI 2005-2011), menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah

⁴ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid; Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*.

⁵ Muladi, "Wawasan Kebangsaan (4 Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara)," last modified 2019, diakses Januari 10, 2022, <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-ideologi-dan-wawas.html>.

dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Dalam suatu masyarakat bangsa yang majemuk, diperlukan satu dasar yang bersifat ontologis untuk menjadi titik tumpu dalam mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Indonesia merupakan bangsa yang di dalamnya terdapat masyarakat majemuk yang memiliki berbagai kepercayaan atau agama, berbagai suku dan ras, bermacam-macam budaya dan bahasa. Keberbagaian ini telah diikat dan disatukan dalam satu dasar ideologi negara, yaitu Pancasila dengan semboyannya, Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakekatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakekatnya satu, satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Menurut Yudi Latif,⁶ menjelaskan bahwa dasar ontologis Pancasila adalah kehendak mencari titik temu ("persetujuan") dalam menghadirkan kemasalahatan dan kebahagiaan bersama (*al-mashlahatul al-ammah* atau *bonnum comune*) dalam suatu masyarakat bangsa yang majemuk. Jika dirumuskan, bermula dari kesepakatan bersama bahwa Pancasila menjadi titik tumpu, kemudian ada kehendak dalam mencari titik temu dan akhirnya Pancasila menjadi titik tuju bersama.

Lebih lanjut Yudi Latif⁷ menjelaskan, selain modal ideologi yang menjadi titik tumpu bersama, diperlukan juga modal jaringan-jaringan konektivitas dan inklusivitas sosial yang mampu menyatukan keragaman kepingan-kepingan kepentingan pribadi dan kelompok ke dalam suatu komunitas persaudaraan bersama, yang menjadi tumpuan rasa saling percaya (*mutual trust*). Untuk menjadi kekuatan kolektif yang kohesif, konektivitas dan inklusivitas ini harus diikat oleh kesamaan basis moralitas (*shared values*). Seperti yang dinyatakan oleh John Gardner⁸ "Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar".

⁶ Yudi Lafif, "Wawasan Kebangsaan" (Jakarta: Kemenpora RI, 2020).

⁷ Ibid.

⁸ John Gardner, *Pancasila Dalam Praksis Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2019).

Ada enam nilai inti moral publik Menurut Jonathan Haidt,⁹ yaitu: 1. **Care**: peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama. 2. **Fairness**: rasa keadilan dan kepatantasan. 3. **Liberty**: kebebasan dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. 4. **Loyalty**: kesetiaan pada institusi, tradisi dan konsensus bersama. 5. **Authority**: respek terhadap otoritas yang disepakati bersama. 6. **Sanctity**: menghormati nilai-nilai yang dipandang paling “suci” (utama).

Keenam nilai moral publik di atas apabila telah menjadi cara pandang (*Worldview*) dan cara hidup setiap warga negara, maka akan terbentuk konektivitas dan inklusivitas sosial sebagai modal untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dalam arti lain, nilai-nilai yang dipandang suci, dalam hal ini adalah nilai-nilai agama, perlu dirubah dari yang bersifat eksklusif (tertutup) ke arah yang lebih inklusif (terbuka) atau dalam bahasa lain, dari sikap subjektif ke arah objektif. Dalam konteks Islam, nilai-nilai ajaran yang dikandungnya haruslah menjadi *rahmatan lil ‘alamin* (rahmat bagi seluruh isi alam) bukan sebaliknya, justru menjadi *la’natan lil ‘alamin* (bencana bagi seluruh isi alam) atau sekadar menjadi *rahmatan linafsihi* (menjadi rahmat untuk dirinya sendiri) atau golongannya saja.¹⁰ *Rahmatan lil ‘alamin* inilah yang menjadi tujuan dari sikap inklusivitas dan objektivitas.

Secara sederhana, konsep objektivikasi Islam menurut Kuntowijoyo¹¹ bermakna menjadikan Islam sebagai rahmat bagi segenap alam (*rahmatan lil ‘alamiin*), artinya ada internalisasi nilai-nilai Islam kepada orang bukan Islam dengan tidak memaksakan pandangan secara subjektif tetapi atas dasar objektif, sehingga mereka bisa menerima ajaran Islam. Hal ini ditegaskan juga oleh Sutrisno¹² bahwa objektivikasi Islam diartikan dengan “*Islam that can be transmitted openly and without secrecy*”. Maksudnya adalah Islam yang ajarannya bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang, termasuk orang bukan Islam sekalipun.

Dalam konteks kebangsaan, isu sosial yang hari-hari ini menguat di antaranya adalah gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-kelas sosial. Selain itu juga soal

⁹ Jonathan Haidt, *The Righteous Mind*, ed. Damaring TyasWulandari Palar (Jakarta: Gramedia, 2020).

¹⁰ Imam Munawwir, *Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).

¹¹ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu; Epistemologi, Metodologi dan Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).

¹² Sutrisno, *Critical Issues and reform in Muslim Higher Education* (Kuala Lumpur: IIUM, 2015).

menguatnya politisasi identitas baik berdasarkan suku, ras maupun agama. Dari kedua isu dan gejala sosial tersebut, ada isu yang masih menjadi senter sampai sekarang adalah soal paham radikalisme di kalangan orang beragama. Atas nama agamanya, lantas berbuat intoleran kepada sesama warga negara yang berbeda agama, etnis, suku maupun budaya. Mereka yang menyebarkan teror dan ketakutan bahkan sampai berani membunuh warga negara lain pantas disebut sebagai teroris. Menurut Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid¹³ menyatakan bahwa seorang teroris pasti fahamnya radikal, tetapi orang yang berfaham radikal belum tentu teroris. Jadi sesungguhnya teroris itu tidak punya agama, karena agama manapun di dunia ini tidak ada yang mengajarkan untuk membunuh bahkan membantai sesama manusia. Semua agama mengajarkan kedamaian dan cinta kasih.

Islam sering menjadi objek tuduhan sebagai agama yang radikal yang mengajarkan nilai-nilai kekerasan dengan menganggap orang kafir (di luar Islam) harus diperangi karena halal darahnya dan pandangan-pandangan lain yang cenderung menyudutkan Islam. Padahal Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi segenap alam) yang mengajarkan nilai-nilai “salam” atau keselamatan, termasuk menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*) baik jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain adalah ajaran esensial dalam agama Islam. Disebutkan dalam al-Qur'an mengenai larangan membunuh jiwa manusia dan perintah supaya menjaga dan melindungi jiwa manusia. Allah s.w.t. berfirman yang artinya:

“.....Barangsiapa yang membunuh satu jiwa, bukan karena jiwa yang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya....” (Q.S. Al-Maidah, 5:32)

Terhadap hewan saja Islam mengajarkan untuk berakhlak dan memperlakukannya dengan baik apalagi dengan manusia. Faham radikal yang bersifat dekonstruktif seperti yang disebutkan perlu dicegah penyebarannya sekaligus ada upaya untuk diluruskan. Para pelaku teroris yang mengaku Islam sebenarnya hanyalah oknum yang mengatasnamakan agama, sehingga yang salah bukan agamanya tetapi cara mereka memahami ajaran agama yang keliru atau menyimpang.

¹³ Ahmad Nurwakhid, “No Title,” last modified 2020, <https://bnpt.go.id/bnpt-tidak-semua-yang-radikal-adalah-teroris>.

Faham-faham radikalisme disebarkan cukup massif kepada masyarakat terutama di kalangan para pemuda. Pemuda yang notabene adalah generasi yang mempunyai sikap permisif terhadap ide atau gagasan yang besar dan visioner bisa terpengaruh dengan faham radikalisme ini. Terutama kalangan anak muda yang memiliki tingkat pendidikan rendah, kemudian tingkat ekonomi yang minim, ditambah pengetahuan agamanya kurang, bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran radikalisme, misalnya diiming-imingi syurga dengan cara mati syahid yaitu dengan cara bom bunuh diri. Kemudian didoktrin bahwa apa yang dia lakukan akan diberi balasan syurga oleh Allah s.w.t., padahal Islam tidak pernah mengajarkan bom bunuh diri, bahkan perbuatan bunuh diri sendiri sangat dibenci oleh Allah s.w.t. karena telah mendahului takdir-Nya (HR. Bukhari no. 6105, Muslim no. 110). Apalagi bunuh diri dengan membunuh manusia.

Masyarakat, khususnya kalangan pemuda perlu berhati-hati dan waspada terhadap ajakan dan doktrin-doktrin faham radikalisme. Untuk mencegah penyebaran faham radikalisme terutama di kalangan pemuda, bisa dilakukan melalui gerakan komunitas produktif yang diinisiasi oleh komunitas-komunitas pemuda untuk melakukan hal-hal yang produktif dengan aktifitas-aktifitas yang positif. Komunitas-komunitas di lingkungan, baik di masyarakat, sekolah, atau kampus perlu bersinergi bersama-sama untuk mencegah dan menanggulangi faham radikalisme. Di antara cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat kampanye lawan radikalisme melalui media sosial maupun platform yang lain. Jika ditemukan ada anak-anak muda atau kelompok yang terindikasi faham radikalisme, perlu diberikan edukasi dan sosialisasi. Dimulai dengan *heart* (hati) yaitu melakukan pendekatan dari hati ke hati, diajak dan dirangkul. Selanjutnya dengan *hand* (tangan) artinya memberikan bantuan baik berupa materil maupun dukungan moril. Terakhir dengan *head* (narasi) yaitu diajak berdialog supaya mendapatkan pemahaman yang benar terhadap ajaran agama yang dianutnya.

Radikalisme yang bersifat dekonstruktif adalah musuh bersama. Apapun agamanya, tidak akan diajarkan nilai-nilai kekerasan yang mengarah kepada perbuatan terorisme. Semua agama mengajarkan nilai-nilai kedamaian dan cinta kasih, walaupun ada yang keluar dari nilai tersebut maka sebenarnya yang salah bukan agamanya tetapi mereka adalah oknum yang salah memahami ajaran agamanya. Peran pemuda melalui komunitas, tentu juga dukungan dari pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah penyebaran faham radikalisme, karena menurut data yang disampaikan

oleh Ikhwan Syarief¹⁴ (Satgas Pencegahan Terorisme BNPT 2020-2021) bahwa sasaran dari faham ini adalah para pemuda dari rentang usia 21-30 tahun. Tentu edukasi yang diberikan, terutama kepada mereka yang sudah terpapar faham radikalisme, perlu dilakukan dengan cara-cara yang humanis.

Selain edukasi dan sosialisasi, peran agama sendiri, dalam menguatkan wawasan kebangsaan juga sangat diperlukan. Tentu dalam hal ini, para da'i (penyampai) dan juga lembaga atau ormas agama perlu menampilkan wajah agama yang membawa ajaran-ajaran fungsional dan aplikatif, mampu menjadi jawaban atas segala permasalahan sosial yang terjadi. Mengutip perkataan Haedar Natsir,¹⁵ agama yang tidak serba memakai fikih *an sich* (klasik), melainkan fikih *tajdid* (pembaharuan) atau pencerahan yang berkemajuan. Selain itu juga, butuh agama yang berdimensi *ihsan* (baik), mampu keluar dari sikap eksklusivitas kepada inklusivitas atau dari sekadar ajaran yang bersifat subjektif ke arah yang lebih objektif. Perspektif inilah yang perlu dihidupkan oleh agama di masa modern seperti ini.

Selain ajaran yang bersifat *tajdid* dan berdimensi *ihsan*, Islam sesungguhnya telah menyediakan basis ajaran supaya ummatnya bersikap *wasathiyah* (moderat/pertengahan). Inilah salah satu sikap dari upaya melakukan objektivikasi Islam. Keseimbangan di sini adalah ciri yang melihat bahwa antara urusan dunia dan akhirat, jasmani dan ruhani, individu dan sosial, ilmu dan amal, dan seterusnya haruslah seimbang. Artinya, tidak terjadi dualisme karena dasar yang satu dan lainnya saling berhubungan dan saling terkait. Ciri keseimbangan ini merupakan landasan dan berimplikasi kepada terwujudnya keadilan, yaitu adil terhadap diri sendiri dan adil terhadap orang lain.¹⁶ Sikap moderat adalah upaya untuk mencegah sikap ekstrim yang dapat menimbulkan sikap intoleran yang berujung pada perpecahan dan retaknya persatuan dalam tubuh bangsa.

Untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, atau cara ber-Islam yang objektif atau sikap beragama yang inklusif, yang disebut sikap moderasi beragama. Menurut Darlis,¹⁷ moderasi itu artinya moderat,

¹⁴ Ikhwan Syarief, "Cegah Radikalisasi, Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana Selenggarakan FGD Terorisme," last modified 2020, diakses Januari 10, 2022, <https://unkris.ac.id/artikel/A116/cegah-radikalisasi-mahasiswa-universitas-krisnadwipayana-selenggarakan-fgd-terorisme>.

¹⁵ Haedar Natsir, "Muhammadiyah Tak Bisa Fikih An Sich," *Republika* (Jakarta, Juni 9, 2015).

¹⁶ Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, 1 ed. (Depok: Kencana, 2018).

¹⁷ Darlis, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural," *Rausyan Fikr* 13, no. 2 (2017).

lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. Moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (*local wisdom*). Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran.¹⁸

Selain cara-cara bersikap yang telah dijelaskan di atas, objektivikasi Islam juga bermaksud ingin membawa atau merubah kata toleransi yang sekadar bermakna kerukunan atau menghargai ke arah kooperasi yang bermakna kerjasama antarumat beragama dalam rangka mensukseskan agenda bersama, baik yang bersifat nasional maupun global. Misalnya yang menjadi agenda nasional seperti masalah pembangunan, keadilan, kemiskinan, keterbelakangan, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam isu agenda global, seperti tantangan modernitas, alienasi, spiritualisme, dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Dengan demikian, agama-agama merupakan kekayaan bersama bangsa dan kemanusiaan.¹⁹

Dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis (1988), mencakup tiga wilayah, yaitu : *affiliation* (perhubungan), *cooperation and resolution conflict* (kerjasama dan penyelesaian konflik), *kindness, care and affection/ emphatic skill* (keramahan, perhatian, dan kasih sayang).

Dalam buku berjudul "*The War for Kindness; Building Empathy in a Fractured World*" yang ditulis oleh Jamil Zaki,²⁰ menjelaskan pentingnya

¹⁸ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019).

¹⁹ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid; Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*.

²⁰ Jamil Zaki, *The War for Kindness; Building Empathy in a Fractured World* (New York: Penguin Random House, 2020).

membangun kebaikan dengan amal *jama'i* atau kolektif di tengah pudarnya nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Jamil memaknai ayat "*Fastabiqal khairat*" dalam surah al-Baqarah ayat 148 bukan hanya berlomba-lomba dalam kebaikan tetapi "perang" untuk kebaikan. Dalam arti, beramal dengan tujuan untuk kebaikan perlu dengan kekuatan *jama'i* atau secara bersama-sama dengan strategi yang terorganisir dengan baik. Dalam Islam, menjalin kerjasama dengan umat agama lain tidak dilarang, selama kerjasama dalam hal muammalah, yaitu dalam urusan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Kerjasama yang dilarang adalah dalam hal aqidah atau keyakinan, karena pada prinsipnya sudah jelas bahwa *lakum diinukum waliyadain* (untukmu agamamu, untukku agamaku).

Gerak kerja dalam organisasi atau komunitas dengan spirit kolektif-kooperatif seperti inilah yang diperlukan bangsa Indonesia hari ini di tengah ujian polarisasi dan disharmoni khususnya hubungan antarumat beragama. Dalam merealisasikan misi kebaikan bersama, maka perlu membangun kerjasama antarumat beragama sebagai satu bangsa yang sejak masa penjajahan sampai dengan merebut kemerdekaan, telah disatukan dengan perasaan nasib dan cita-cita yang sama, yaitu ingin terwujudnya Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur.

Peran agama-agama yang telah diakui di Indonesia, perlu menghadirkan ajaran yang aplikatif, yang mendekati kepada realitas sosial bukan justru menjauhkan atau menolak realitas yang terjadi. Agama yang menurunkan pikiran dan sikap penganutnya ke bumi secara horizontal bukan menerbangkan sikap dan pikiran penganutnya ke langit (vertikal). Dalam tulisan Kuntowijoyo,²¹ dijelaskan misalnya di Amerika ada gerakan Injil Sosial pada abad ke-19, kemudian di Amerika Latin ada gerakan Teologi Pembebasan pada era 1970-an, di India ada gerakan Sarvodaya pada tahun 1970-an, dan di Indonesia sendiri pada tahun 1980-an muncul gerakan pemikiran ke arah Teologi Transformatif. Dalam hal ini, Islam pun hadir ke muka bumi sebagai gerakan pembebasan (*liberating forces*), karena sesungguhnya misi Islam yang paling besar adalah pembebasan. Islam melakukan revolusi dengan cara membumikan ajaran-ajaran yang bersifat melangit (vertikal) sehingga menghasilkan *nidzam* (sistem) yang universal dan integral.

²¹ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid; Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*.

Puncak dari tujuan ajaran Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam), maka untuk sampai kepada tujuan tersebut, diperlukan objektivikasi Islam supaya Islam tampil dengan wajah yang moderat, inklusif dan objektif. Wajah Islam yang seperti inilah yang diharapkan mampu mempertemukan antara spirit agama dan kebangsaan dalam rangka membangun gerak kerja bersama secara kolektif-kooperatif. Selain itu, agama juga diharapkan dapat berperan dalam menguatkan wawasan kebangsaan, sehingga setiap penganut agama di Indonesia, memiliki sikap saling toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan NKRI.

Kesimpulan

Isu mengenai wawasan kebangsaan yang sering terjadi hari-hari ini antara lain soal intoleransi antarumat beragama, isu mengenai radikalisme dan terorisme, selain itu juga soal sikap ekstrim terhadap agama yang dianut. Isu-isu tersebut telah melahirkan polarisasi dan disharmoni sehingga menyebabkan perpecahan dan retaknya persatuan sebagai satu bangsa. Persoalan ini muncul karena mempertentangkan antara spirit agama dan kebangsaan. Dalam konteks membangun Indonesia, satu pihak ingin berdasarkan agama, di pihak lain ingin berdasarkan nilai-nilai kebangsaan, sehingga keduanya justru saling mengklaim kebenaran dan menuduh yang lain salah. Antara agama dan kebangsaan sesungguhnya tidak ada pertentangan bahkan keduanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Justru peran agama sangat dibutuhkan dalam menguatkan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan semangat zaman yang semakin maju ke depan, maka dalam menyikapi agama dan nasionalisme atau Islam dan kebangsaan perlu dibawa dari sikap subjektivitas kepada sikap objektivitas. Jika aspek subjektivitasnya yang keluar, maka bisa menimbulkan SARA. Oleh karena itu, baik agama dan nasionalisme atau Islam dan kebangsaan perlu memunculkan nilai objektif sebagai *common denominator*, yaitu rujukan bersama dalam membangun Indonesia. Objektivikasi Islam perlu dilakukan supaya Islam tampil dengan wajah yang moderat, inklusif dan objektif. Wajah Islam yang seperti inilah yang diharapkan mampu mempertemukan antara spirit agama dan kebangsaan dalam rangka membangun gerak kerja bersama secara kolektif-kooperatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019).
- Al-Banna, Hasan. *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna*. Diedit oleh Khozin Abu Faqih. Jakarta: Al-I'tishom, 2007.
- Augustin, Saint, dan Grecian Blue Tark. "Philosophy of Religion." In *Pengantar Kajian Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Darlis. "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural." *Rausyan Fikr* 13, no. 2 (2017).
- Gardner, John. *Pancasila Dalam Praksis Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- Haidt, Jonathan. *The Righteous Mind*. Diedit oleh Damarling TyasWulandari Palar. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Kuntowijoyo. *Islam Sebagai Ilmu; Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- . *Muslim Tanpa Masjid; Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2018.
- Lafif, Yudi. "Wawasan Kebangsaan," 2020.
- Muladi. "Wawasan Kebangsaan (4 Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara)." Last modified 2019. Diakses Januari 10, 2022. <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-ideologi-dan-wawas.html>.
- Munawwir, Imam. *Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. 1 ed. Depok: Kencana, 2018.
- Natsir, Haedar. "Muhammadiyah Tak Bisa Fikih An Sich." *Republika*. Jakarta, Juni 9, 2015.
- Nurwakhid, Ahmad. "No Title." Last modified 2020. <https://bnpt.go.id/bnpt-tidak-semua-yang-radikal-adalah-teroris>.
- Sutrisno. *Critical Issues and reform in Muslim Higher Education*. Kuala Lumpur: IIUM, 2015.
- Syarief, Ikhwan. "Cegah Radikalisasi, Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana Selenggarakan FGD Terorisme." Last modified 2020. Diakses Januari 10, 2022. <https://unkris.ac.id/artikel/A116/cegah-radikalisasi-mahasiswa-universitas-krisnadwipayana-selenggarakan-fgd-terorisme>.
- Zaki, Jamil. *The War for Kindness; Building Empathy in a Fractured World*. New York: Penguin Random House, 2020.